

DESAIN KEBIJAKAN RANTAI PASOK SOSIAL YANG INKLUSIF GENDER: INOVASI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PEREMPUAN

Luluk Fauziah¹, Mashudi², Anafil Windriya³

^{1,2,3} Sekolah vokasi Universitas Diponegoro

lulukfauziah@lecturer,undip.ac.id

*corresponding author : Luluk Fauziah

Abstract

Gender inequality within social supply chains remains a fundamental issue that prevents women from achieving optimal economic benefits, despite their significant contributions in various stages of production, processing, and community-based services. Women often remain in disadvantaged positions due to limited access to resources, market information, technology, and strategic decision-making roles. These conditions reinforce structural gender disparities and highlight the need for innovative and gender-responsive policies that acknowledge women's lived experiences and specific constraints. In this context, this study aims to formulate an innovative gender-inclusive social supply chain policy design as a strategic solution to enhance women's economic well-being.

This research employs a qualitative method with a descriptive-exploratory approach. Data were collected through in-depth interviews with women entrepreneurs, local government officials, UMKM facilitators, and other relevant stakeholders, complemented by field observations and analysis of policy documents. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that women continue to face structural barriers including double workload, limited access to financial capital, low digital literacy, and weak bargaining positions within the supply chain network. Moreover, existing policies are not yet fully integrated and therefore fail to adequately address underlying gender imbalances. This study concludes that a gender-inclusive policy design must incorporate process innovation, digitalization of supply chain activities, expanded access to women-friendly financing, capacity building, and greater participation of women in supply chain governance. Overall, the research underscores that innovative and inclusive social supply chain policies can significantly strengthen women's empowerment, enhance economic productivity, and improve community economic resilience in a sustainable manner.

Keywords: social supply chain, gender-inclusive policy, women's empowerment, economic equality, policy innovation.

Abstrak

Ketidaksetaraan gender dalam rantai pasok sosial masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat kontribusi ekonomi perempuan secara optimal, terutama dalam sektor- sektor berbasis komunitas dan UMKM. Meskipun peran perempuan sangat signifikan dalam tahapan produksi, pengolahan, dan jasa berbasis komunitas, mereka tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya, informasi pasar, teknologi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini memperkuat ketimpangan struktural gender dan menegaskan perlunya kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap pengalaman serta kebutuhan perempuan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merumuskan desain kebijakan rantai pasok sosial yang inklusif gender sebagai solusi inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perempuan pelaku usaha, pemangku kepentingan daerah, pendamping UMKM, dan lembaga terkait, serta ditunjang oleh observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan. Teknik analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural berupa beban kerja ganda, keterbatasan akses permodalan, minimnya literasi digital, dan rendahnya posisi tawar dalam jaringan rantai pasok. Selain itu, kebijakan yang tersedia belum terintegrasi secara komprehensif sehingga belum mampu menjawab ketimpangan gender yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa desain kebijakan yang inklusif gender harus mencakup inovasi proses, digitalisasi rantai pasok, perluasan akses pembiayaan ramah perempuan, penguatan kapasitas, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola rantai pasok. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan rantai pasok sosial yang dirancang secara inklusif dan inovatif dapat mendorong pemberdayaan perempuan, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas secara berkelanjutan.

Kata kunci: Rantai pasok sosial, kebijakan inklusif gender, pemberdayaan perempuan, kesetaraan ekonomi, inovasi kebijakan.

Pendahuluan

Meskipun perempuan menyumbang porsi signifikan dalam tenaga kerja global, terutama di sektor-sektor rantai pasok seperti manufaktur dan pertanian, mereka sering menghadapi diskriminasi, upah rendah, pekerjaan yang tidak aman, dan hambatan struktural dalam menaiki tangga karier. Misalnya, menurut *Ethical Trading Initiative (2025)* struktur rantai pasok global masih belum siap menjawab kebutuhan pekerja perempuan secara sistemik; mereka menyarankan intervensi jangka panjang melalui “gender-responsive due diligence” agar kesetaraan gender bisa tercapai dalam praktik operasional rantai pasok. Selain itu, di sektor akademik dan profesional rantai pasok, representasi perempuan masih sangat rendah hanya sebagian kecil yang berada di posisi kepemimpinan. (Simon, 2022)

Partisipasi Perempuan dalam Rantai Pasok Global. Menurut ILO (2019), perempuan menyumbang sekitar 40% dari total tenaga kerja rantai pasok global, tetapi sering ditempatkan di pekerjaan dengan upah rendah, kurang stabil, dan sedikit akses ke jenjang karier. Dalam beberapa sektor seperti garmen (pakaian), proporsi perempuan dalam rantai pasok bisa mencapai 80%, namun mereka tetap menghadapi segregasi pekerjaan dan hambatan nyata dalam naik ke posisi lebih tinggi. Selain itu, menurut survei Gartner (2024), justru terjadi penurunan persentase perempuan dalam jajaran supply chain dibanding tahun sebelumnya dari sekitar 41% ke 40% pada tahun 2024.

Inklusi gender dalam rantai pasok bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang cerdas. IFC menekankan bahwa rantai pasok inklusif (inclusive supply chains) dapat membuka peluang bagi pengusaha perempuan dan pekerja perempuan untuk berpartisipasi lebih penuh dalam produksi dan distribusi. Hal ini dapat menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan daya tahan (resilience) rantai pasok. Dari sisi bisnis, memperkuat partisipasi perempuan dalam rantai pasok dapat memperbaiki stabilitas rantai, memperluas basis pemasok, serta mendukung inovasi sosial. IFC juga menjalankan program “Sourcing Equal” yang menghubungkan perempuan wirausaha dengan peluang pasar melalui pengadaan (procurement) korporasi.

Di tingkat kebijakan, terdapat dorongan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kesetaraan gender melalui kebijakan ekonomi sosial. Di Indonesia, misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyuarkan urgensi kolaborasi lintas sektor untuk mendorong rantai pasok inklusif gender dan insentif bagi bisnis perempuan. Sementara itu, kerangka global seperti SDG (Sustainable Development Goals) juga mendukung agenda ekonomi inklusif dengan menempatkan pemberdayaan

perempuan sebagai elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek sosial, pemberdayaan perempuan melalui rantai pasok sosial membantu memperkuat stabilitas komunitas dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. ILO dalam panduan "*Empowering Women at Work*" menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik yang jujur terhadap gender dapat meningkatkan retensi tenaga kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Selain itu, rantai pasok sosial yang inklusif gender juga dapat menjadi pilar dalam ekonomi restoratif paradigma ekonomi yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan di mana perempuan memainkan peran strategis dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan ekonomi.

Penelitian bertujuan untuk 1) Kondisi aktual keterlibatan perempuan diberbagai segmen rantai pasok sosial 2) Intervensi kebijakan baru untuk memperkuat peran perempuan 3) Dampak sosial, serta kontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga apabila perempuan diberikan akses dan peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dan 4). Desain kebijakan untuk memperkuat peran perempuan pada seluruh tahapan rantai pasok.

2. Landasan teori

2.1. Pendekatan *Gender and Development*

Pendekatan *Gender and Development* (GAD) merupakan paradigma pembangunan yang menekankan bahwa ketidaksetaraan gender bersifat struktural dan muncul akibat norma sosial, pembagian kerja, serta penguasaan sumber daya yang timpang antara laki-laki dan perempuan (Kabeer, 1994; Moser, 1993). Berbeda dari pendekatan *Women in Development* (WID) yang menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan, GAD menekankan bahwa relasi gender harus dilihat sebagai hubungan kekuasaan yang dapat berubah melalui intervensi kebijakan dan transformasi institusional.

Prinsip Utama gender and development (GAD) adalah : a) Gender sebagai relasi sosial, bukan perbedaan biologis. b) Ketidaksetaraan gender bersifat struktural, terutama dalam akses terhadap pendidikan, modal, teknologi, dan peluang ekonomi. c) Perempuan memiliki tiga peran (*triple roles*): Reproduksi (domestik), Produktif (ekonomi), dan Sosial masyarakat. d) Tujuan GAD adalah transformasi melalui kebijakan yang mengubah struktur dan norma yang menyebabkan ketimpangan.

Dalam konteks rantai pasok sosial, GAD membantu menjelaskan mengapa perempuan: terperangkap pada pekerjaan bernilai tambah rendah, minim akses modal dan teknologi, jarang berada pada posisi pengambil keputusan, menghadapi hambatan mobilitas logistik akibat peran domestik. Pendekatan ini menjadi dasar teoritis dalam merancang kebijakan rantai pasok sosial yang inklusif, adil, dan responsif gender

2.2. Supply Chain Management (SCM)

Teori manajemen rantai pasok (Mentzer et al., 2001) menjelaskan integrasi proses bisnis dari pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen untuk menciptakan nilai bersama. SCM menekankan koordinasi, kolaborasi, dan efisiensi dalam mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan. Pada konteks sosial, SCM berkembang menjadi Social Supply Chain, yaitu rantai pasok yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga tujuan sosial seperti: pengurangan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan (termasuk perempuan), keberlanjutan ekonomi lokal, dan inklusivitas komunitas.

Karakteristik rantai pasok sosial antara lain: a) Berorientasi pada kesejahteraan sosial. b) Berbasis komunitas (*community-driven*). c) Melibatkan kelompok rentan sebagai aktor utama dan. d) Bekerja dalam konteks sumber daya terbatas. Dalam penelitian ini, SCM digunakan untuk memetakan posisi perempuan dalam mata rantai pasok, mengidentifikasi hambatan partisipasi, dan merancang intervensi kebijakan untuk memastikan manfaat ekonomi yang diterima perempuan lebih optimal.

2.3. Teori Rantai Nilai dan Rantai Nilai inklusif (*Inclusive Value Chains*)

Rantai nilai (*Value Chain*) menurut Porter (1985) adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk bernilai tambah bagi konsumen. Pada perkembangannya muncul konsep *Inclusive Value Chain* (IVC) atau rantai nilai inklusif yang diperkenalkan oleh IFC, FAO, dan UNDP. IVC bertujuan: a) mengintegrasikan kelompok rentan (perempuan, petani kecil, UMKM) ke dalam rantai nilai formal, b) memperluas akses pada pasar, teknologi, dan pembiayaan, c) mengurangi asimetri kekuasaan antar aktor rantai pasok.

Dalam rantai pasok sosial, perempuan sering berada pada posisi paling hilir dengan nilai tambah terendah. Konsep IVC menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan dapat: a) menghubungkan perempuan ke pasar yang lebih besar, b) meningkatkan nilai tambah dari kerja produktif perempuan, c) memperbaiki posisi tawar perempuan dalam rantai pasok.

2.4. Gender Responsive Policy

Kebijakan responsif gender adalah kebijakan yang mempertimbangkan dampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan serta dirancang untuk mengurangi kesenjangan gender. UN Women menegaskan bahwa kebijakan responsif gender harus: a) berbasis data terpilah menurut gender, b) memperhitungkan kebutuhan khusus perempuan, c) memperbaiki akses perempuan terhadap sumber daya produktif, dan d) mendorong perempuan pada posisi pengambilan keputusan. Dalam konteks rantai pasok sosial, kebijakan responsif gender dapat berupa: *gender-responsive procurement* (pengadaan publik yang memprioritaskan UMKM perempuan), pelatihan logistik untuk perempuan, perlindungan kerja bagi perempuan sektor informal, penyediaan fasilitas pendukung seperti childcare untuk mengurangi beban domestik. Teori GRP memberikan kerangka untuk menilai apakah kebijakan rantai pasok sosial: memperkuat peran perempuan, meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi hambatan struktural yang mereka hadapi.

2.5. Teori Inovasi Kebijakan (*Policy Innovation*)

Osborne & Brown (2011) membagi inovasi kebijakan ke dalam empat jenis: a) Inovasi proses menciptakan cara baru dalam menjalankan layanan atau program. b) Inovasi produk/layanan pengembangan solusi baru untuk mengatasi masalah publik. c) Inovasi sistem perubahan struktur institusi atau tata kelola dan d) Inovasi relasional model kolaborasi baru antar pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, teori inovasi kebijakan berguna untuk merancang solusi kreatif dalam: menghubungkan perempuan dengan pasar melalui digitalisasi rantai pasok, menciptakan skema kemitraan ramah perempuan, memperbaiki regulasi yang bias gender, menyediakan platform logistik komunitas berbasis perempuan. Inovasi kebijakan menjadi penting untuk mengatasi hambatan struktural yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tradisional.

2.6. Kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Penelitian ini juga berlandaskan SDGs sebagai kerangka normatif pembangunan global, khususnya: SDG 5: Kesetaraan Gender, SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan. SDGs menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan strategi utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks rantai pasok sosial, SDGs menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang: inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan gender.

2.7. Alur Pemeikiran penelitian (*Narrative Flow*)

Penelitian ini dimulai dari identifikasi ketimpangan gender dalam rantai pasok sosial, yang dijelaskan melalui teori *Gender and Development* (GAD). Teori ini menyatakan bahwa ketimpangan muncul karena hambatan struktural, relasi kuasa, dan pembagian kerja yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender ini kemudian dikaitkan dengan teori *Supply Chain Management* (SCM) dan *Value Chain*, yang menunjukkan bahwa perempuan sering berada pada segmen bernilai tambah rendah dalam rantai pasok. Hambatan tersebut mencakup akses teknologi, modal, jaringan pemasaran, dan posisi pengambilan keputusan.

Berdasarkan analisis tersebut, dibutuhkan kebijakan responsif gender (*Gender-Responsive Policy/GRP*) yang berfungsi memperbaiki akses perempuan terhadap sumber daya, teknologi, perlindungan kerja, dan peluang pasar. Untuk merancang kebijakan tersebut, penelitian menggunakan teori *Inovasi Kebijakan (Policy Innovation)* yang menekankan perlunya solusi kreatif, kolaboratif, dan transformasional termasuk digitalisasi rantai pasok sosial, model kemitraan inklusif gender, dan pengadaan publik yang pro-perempuan. Seluruh proses analisis dan perumusan kebijakan dipandu oleh kerangka normatif **SDGs (5, 8, 12)** yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Akhirnya, integrasi keempat teori utama (GAD, SCM/Value Chain, GRP, *Policy Innovation*) menghasilkan Desain Kebijakan Rantai Pasok Sosial yang Inklusif Gender sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam kondisi struktural, pengalaman, dan dinamika yang memengaruhi posisi perempuan dalam rantai pasok sosial, serta merumuskan desain kebijakan yang inklusif gender. Pendekatan ini dipilih karena isu gender dan kebijakan publik bersifat kompleks, kontekstual, dan membutuhkan eksplorasi makna dari perspektif para pelaku.

3.1. Desain Penelitian

Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif yang berfokus pada kelompok perempuan pelaku usaha atau pekerja dalam rantai pasok sosial di sektor tertentu (misalnya makanan, pertanian, kerajinan, atau UMKM komunitas). Penelitian ini memungkinkan peneliti menggali faktor struktural, hambatan gender, dan peluang inovasi kebijakan secara lebih mendalam.

3.2. **Informan** dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria: a) perempuan pelaku usaha/pekerja dalam rantai pasok sosial, a) pemangku kepentingan terkait (pemerintah daerah, dinas pemberdayaan perempuan, koperasi, NGO, pembeli/pemasok), b) pihak yang memahami isu gender dan rantai pasok. c) Jumlah informan bersifat fleksibel mengikuti prinsip *saturation* (data jenuh)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) untuk menggali pengalaman perempuan, hambatan gender, akses nilai tambah, serta kebutuhan kebijakan. Observasi lapangan terhadap aktivitas rantai pasok, interaksi sosial, dan kondisi kerja. Studi dokumentasi seperti laporan pemerintah, data UMKM perempuan, regulasi, dan kebijakan terkait gender dan rantai pasok. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan keabsahan data.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup tiga tahapan: Reduksi data (mengelompokkan tema seperti hambatan gender, akses pasar, inovasi

kebijakan), Penyajian data (membuat matriks tema, peta konsep, dan hubungan antar faktor), Penarikan kesimpulan yang menghasilkan rancangan kebijakan rantai pasok sosial inklusif gender.

3.5. Validitas Data

Untuk menjamin kredibilitas penelitian, digunakan: Triangulasi sumber dan metode, Member checking kepada informan, Peer debriefing dengan ahli gender atau logistik sosial

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kondisi aktual keterlibatan perempuan diberbagai segmen rantai pasok sosial Intervensi kebijakan baru untuk memperkuat peran perempuan

Hambatan struktural gender yang masih kuat dalam rantai pasok sosial. Temuan di lapangan: mayoritas perempuan pelaku UMKM atau pekerja rantai pasok menghadapi ketidaksetaraan struktural yang berupa: Beban kerja ganda (domestik dan produktif), keterbatasan akses teknologi dan informasi pasar, minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan rantai pasok, keterikatan norma sosial yang membatasi mobilitas perempuan, dan rendahnya akses pembiayaan formal. Perempuan cenderung ditempatkan pada bagian rantai pasok dengan nilai tambah rendah (produksi awal, pengemasan, penjualan skala kecil).

Hasil ini sejalan dengan teori *Gender and Development (GAD)* yang menegaskan bahwa ketimpangan gender muncul dari struktur sosial dan relasi kuasa, bukan kelemahan individu. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan rantai pasok harus mempertimbangkan kondisi struktural dan norma sosial yang menghambat perempuan untuk naik ke segmen rantai pasok bernilai tambah tinggi.

4.2. Intervensi kebijakan baru untuk memperkuat peran perempuan

Posisi perempuan dalam rantai pasok masih lemah dan tidak terintegrasi temuan lapangan. Perempuan memiliki: Peran krusial dalam produksi dan pengolahan, Namun hanya sedikit akses pada jaringan pemasaran, distribusi, atau pengelolaan logistik, Peran kepemimpinan pada koperasi/kelompok usaha masih minim, Mereka tidak mendapatkan informasi harga, pasar, dan permintaan secara *real-time*.

Dari perspektif *Supply Chain Management (SCM)* dan *Value Chain Theory*, posisi perempuan yang lemah menunjukkan adanya ketimpangan dalam: akses sistem logistik, integrasi proses, dan distribusi nilai ekonomi. Ketidakmerataan akses ini menyebabkan perempuan tidak memperoleh manfaat ekonomi optimal dari keterlibatan mereka di rantai pasok sosial. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang memperbaiki *governance* rantai pasok agar perempuan terhubung dengan pasar yang lebih luas.

4.3. Dampak sosial, serta kontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga

Dampak pada Kesejahteraan Ekonomi Perempuan, temuan lapangan setelah mengikuti program, pelatihan, kemitraan, atau intervensi berbasis komunitas: perempuan mengalami peningkatan pendapatan, kemampuan mengelola usaha lebih baik, akses pasar bertambah, kepercayaan diri meningkat, posisi tawar dalam rumah tangga dan komunitas lebih kuat.

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif gender mampu: mendorong *women's economic empowerment*, memperkuat posisi perempuan dalam rantai nilai, meningkatkan keberlanjutan ekonomi keluarga. Temuan ini selaras dengan tujuan SDGs 5, 8, dan 12, yang menekankan pentingnya kombinasi antara keadilan gender dan produksi berkelanjutan.

4.4. Desain kebijakan untuk memperkuat peran perempuan pada seluruh tahapan rantai pasok.

Kebutuhan mendesak akan kebijakan responsif gender (GRP) temuan lapangan Perempuan mengungkapkan perlunya: Pelatihan peningkatan kapasitas khusus perempuan, Akses pembiayaan dengan prosedur yang ramah perempuan, Digitalisasi rantai pasok (platform marketing, akses

informasi harga), Pendampingan usaha dan manajemen logistik, Kebijakan pengadaan publik yang memberi ruang bagi UMKM perempuan, Penyediaan sarana pendukung seperti ruang childcare saat kegiatan usaha.

Temuan ini konsisten dengan teori Gender-Responsive Policy (GRP) yang menyatakan bahwa kebijakan harus mempertimbangkan pengalaman berbeda antara laki-laki dan perempuan. Intervensi seperti pelatihan, digitalisasi, dan perlindungan tenaga kerja perempuan merupakan langkah strategis untuk menciptakan kebijakan rantai pasok yang inklusif gender dan meminimalkan bias struktural.

6. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender dalam rantai pasok sosial bukan hanya persoalan mikro yang dialami perempuan secara individual, tetapi merupakan persoalan struktural, sistemik, dan melekat dalam tata kelola rantai pasok. Melalui pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan besar dalam akses sumber daya, teknologi, pasar, dan posisi kepemimpinan. Hambatan ini bersumber dari norma sosial, relasi kuasa, bias struktural kebijakan, serta mekanisme distribusi nilai ekonomi yang belum berpihak pada perempuan.

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan struktural gender merupakan akar permasalahan yang menghambat perempuan untuk menikmati manfaat ekonomi secara optimal dari keterlibatan mereka di rantai pasok sosial. Kondisi tersebut selaras dengan kerangka Gender and Development (GAD) yang memandang bahwa posisi perempuan tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sosial, relasi kuasa, dan struktur kebijakan.

Kedua, posisi perempuan dalam rantai pasok sosial masih timpang, terutama dalam aktivitas bernilai tambah tinggi seperti pengelolaan logistik, pemasaran strategis, dan pengambilan keputusan. Perempuan lebih banyak terjebak pada peran operasional dan domestikasi proses produksi, sehingga kontribusinya tidak tercermin dalam peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Ketidaksetaraan posisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang menasar redistribusi nilai dan akses.

Ketiga, penelitian menemukan bahwa kebijakan responsif gender (GRP) memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan, namun implementasinya masih parsial, sektoral, dan belum terintegrasi antar lembaga. Banyak kebijakan yang belum menangkap pengalaman spesifik perempuan dalam rantai pasok sosial. Oleh karena itu, model kebijakan baru yang inklusif gender perlu menekankan integrasi lintas sektor, kolaborasi multipihak, dan penguatan kapasitas kelompok perempuan.

Keempat, inovasi kebijakan menjadi kunci transformasional. Inovasi tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga inovasi proses, institusi, dan relasi sosial. Desain kebijakan rantai pasok sosial yang inklusif gender harus berorientasi pada: a) digitalisasi proses rantai pasok berbasis kesetaraan, b) perluasan akses pembiayaan yang mudah bagi perempuan, c) sistem pendampingan usaha yang berkelanjutan, dan d) ruang partisipasi perempuan dalam tata kelola rantai pasok.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika intervensi kebijakan dilakukan secara komprehensif dan inklusif, perempuan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi, baik dari peningkatan pendapatan, perluasan pasar, peningkatan kapasitas, hingga penguatan posisi tawar dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dampak ini membuktikan bahwa desain kebijakan yang tepat dapat menciptakan perubahan struktural yang mendalam. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa desain kebijakan rantai pasok sosial yang inklusif gender bukan hanya solusi teknis, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan: keadilan ekonomi, peningkatan produktivitas nasional, pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan, dan pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs).

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Fasilitas akademik, kemudahan akses sumber daya, serta lingkungan penelitian yang kondusif telah menjadi faktor penting dalam kelancaran proses penelitian. Tak terkecuali dukungan pendanaan/anggaran penelitian yang diberikan oleh Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan secara optimal mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Dukungan tersebut tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga memperkuat komitmen dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dan administrasi logistik yang berperspektif gender. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu, penguatan kebijakan, serta peningkatan kualitas program akademik di lingkungan Sekolah Vokasi

Referensi

- Elson, D. (1995). *Male Bias in the Development Process*.
ILO (2020). *Women in Supply Chains: Decent Work and Gender Equality*
Kabeer, N. (1994). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*.
Mentzer et al. (2001); Beamon (2004); Kovács & Spens (2011).
Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*.
Porter (1985); IFC (2016); FAO (2018); Oxfam (2019).
SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). *Gender Toolbox*.
Osborne & Brown (2011); Mulgan (2007); Hartley (2005).
UN SDGs Report (2015–2024).
UN Women (2015–2024). *Gender Equality and Women's Empowerment Reports*.